

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 merupakan dokumen vital pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan yang menentukan arah pembangunan selama lima tahun kedepan. RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 menjadi penjabaran dari visi, misi dan program Bupati serta Wakil Bupati Pamekasan yang penyusunannya berpedoman pada kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, yakni RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah. Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan juga disesuaikan dengan kebijakan pembangunan daerah yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19, penyesuaian dengan SOTK baru serta dinamika pembangunan baru lainnya di Kabupaten Pamekasan, mempertimbangkan kondisi-kondisi capaian RPJMD periode sebelumnya termasuk tahapan-tahapan yang dirumuskan didalamnya dan analisis faktor internal maupun faktor eksternal berdasarkan hasil telaah visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. RPJMD selanjutnya memberikan arah rencana pembangunan daerah jangka menengah untuk

pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)¹.

RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 memiliki 10 program prioritas. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, yang dimaksud dengan program prioritas ini adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Salah satu program prioritas dalam bidang ketenagakerjaan yaitu program Wira Usaha Baru atau Pembinaan Sepuluh Ribu Wirausaha Baru dan Calon Wirausaha Baru (*Sapu Tangan Biru*). Tujuan program Wira Usaha Baru ini yakni:

- a. Mengurangi pengangguran dengan menciptakan peluang berwirausaha berbasis potensi desa;
- b. Membangun kerjasama pelatihan wirausaha dengan kementerian/ lembaga, BPWS, CSR perusahaan, dll;
- c. Memajukan perusahaan yang telah beroperasi untuk menjalankan fungsi sebagai Balai Latihan Kerja bagi calon tenaga kerja lokal;
- d. Optimalisasi fungsi Balai Latihan Kerja untuk menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan menghasilkan tenaga kerja bersertifikat;
- e. Mendorong terbentuknya komunitas baru berbasis ekonomi melalui Program “*Millenial Talent Hub*” sebagai fungsi Balai Latihan Kerja;

¹ RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, h. 22

- f. Penguatan regulasi dan kebijakan dalam rangka kemudahan investasi padat modal atau padat karya;
- g. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal dalam rangka iklim investasi yang baik dan kondusif;
- h. Meningkatkan komunikasi dan promosi investasi bersama para investor melalui forum pengusaha besar maupun kecil;
- i. Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dalam rangka penyerapan tenaga kerja;
- j. Penyediaan dan Optimalisasi Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera);
- k. Peningkatan kualitas pengolahan produk industri rumah tangga berbasis *One Village One Product*;
- l. Revitalisasi Pasar dan Pasar Tetap Tradisional yang bersih;
- m. Merintis Wisata Edukasi, wisata halal dan taman budaya yang mampu menumbuhkan peluang berwirausaha.²

Program Wira Usaha Baru menjadi penting karena belum optimalnya pengelolaan ekonomi inklusif berbasis potensi dan keunggulan lokal yang berpengaruh pada lapangan pekerjaan³. Hal ini sebagaimana ditunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2020 yaitu 69,82%. Tingkat partisipasi angkatan kerja (*labor force participation rate*) adalah rasio antara angkatan kerja (semua yang saat ini bekerja atau mencari kerja) dengan total

² Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, h. 51

³ *Ibid*, h. 4.

penduduk usia kerja. Disamping itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 yaitu 3,49%⁴. TPT di Kabupaten Pamekasan disebabkan karena adanya dampak krisis global yang mencapai puncaknya pada tahun 2015 yang lalu sangat dirasakan oleh seluruh negara di dunia dan tidak terkecuali negara Indonesia yang ditunjukkan dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Melemahnya perekonomian secara global tak urung membuat ekspor Indonesia juga ikut menjadi lesu dan sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia.⁵

Selain itu permasalahan bertambahnya tingkat pengangguran di Kabupaten Pamekasan disebabkan beberapa hal berikut :

- a. Minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Kabupaten Pamekasan yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja;
- b. Kurangnya keterampilan masyarakat dalam pekerjaan;
- c. Masih adanya kesenjangan antara *supply* tenaga kerja yang tersedia dengan *demand* atau kebutuhan perusahaan/usaha;
- d. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar) tenaga kerja;

⁴ BPS dan Pamekasan Dalam Angka, 2021, h. 1

⁵ Dokumen Pamekasan dalam Angka

- e. Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK dan masih rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja; dan
- f. Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan (lembaga/perusahaan, dan pekerja) serta lemahnya pengendalian terhadap masuknya tenaga kerja asing ⁶.

Lebih lanjut, selain permasalahan pengangguran, permasalahan kemiskinan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan. Pada tahun 2020 karena adanya dampak pandemi Covid-19, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pamekasan mengalami kenaikan menjadi 129,41 jiwa atau persentase kemiskinan menjadi 13,95%, dimana sebelumnya pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin 122,43 jiwa atau persentase kemiskinan 14,6% ⁷. Pandemi Covid-19 sebagaimana dikutip dari materi paparan Bupati Pamekasan yang berjudul “Arah Kebijakan Kabupaten Pamekasan Pasca Pandemi: Pemulihan ekonomi dan Tatahan Sosial Baru Melalui Fokus Implementasi Program Prioritas Daerah” berdampak pada beberapa aspek, diantaranya yakni: a) 3.667 industri kecil dan menengah tidak berproduksi, 1.828 pedagang/PKL mengalami penurunan omzet, 1.490 ojek dan tukang becak terdampak, 49 orang terkena PHK 237 orang pekerja migran Indonesia (PMI) dipulangkan, 9 lokasi destinasi wisata tutup, 540 orang pekerja seni dan pelaku wisata terdampak.

⁶ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, h. 36

⁷ Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, h. 27

Meskipun begitu, penduduk miskin di Kabupaten Pamekasan jumlahnya terendah bila dibandingkan dengan tiga kabupaten lainnya yang ada di Madura. Di bawah ini tabel jumlah penduduk miskin di kabupaten di Madura dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2020:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/ Kota di Madura dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2020⁸

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	
	2019	2020
Bangkalan	186,11	204,00
Sampang	225,13	204,82
Pamekasan	137,77	129,41
Sumenep	211,92	218,60
Jawa Timur	4.617,01	4.332,59

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan merasa perlu untuk membuat program prioritas Wira Usaha Baru untuk mengatasinya. Prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten Pamekasan di bidang ketenagakerjaan adalah pembinaan 10.000 Wira Usaha Baru (Sapu Tangan Biru) di Pamekasan sampai tahun 2023. Bentuk kegiatan dari program Wira Usaha Baru antara lain pelatihan, pemagangan, *workshop*, dan pendampingan. Penumbuhan program Wira Usaha Baru dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan (2021) Statistik Daerah Kabupaten Pamekasan 2020. BPS Kabupaten Pamekasan', h. 12.

Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSP Naker), Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Pembudayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk (DP4), dan Dinas PMD (DPMD).

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 bidang ketenagakerjaan (Studi Kasus Program Wira Usaha Baru)?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah dalam implementasi RPJMD Program Wira Usaha Baru?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada prinsipnya merupakan hakekat dari penelitian itu sendiri. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menelaah lebih lanjut mengenai implementasi RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 bidang ketenagakerjaan (Studi Kasus Program Wira Usaha Baru).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Hasil penelitian dapat menjelaskan secara teoritis mengenai implementasi RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 Bidang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Program Wira Usaha Baru);
2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama bagi penelitian yang menggunakan teori sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan melalui penelitian ini adalah dengan adanya rekomendasi yang diberikan dari penelitian ini kedepan dapat memberikan sumbangsih ide atau saran dan masukan bagi pihak terkait untuk mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 Bidang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Program Wira Usaha Baru) secara efektif.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Kebijakan Publik

1.5.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Dalam kebijakan publik, kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Kamus Besar bahasa Indonesia kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan,

kepemimpinan, serta cara bertindak⁹. Kebijakan merupakan kata yang sangat sulit dikenal sehari-hari oleh masyarakat.

James E Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Dalam buku ini kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah di dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, ekonomi, politik, pertanian, industri, pertahanan dan sebagainya.¹⁰

Kata kebijakan mempunyai konotasi yang berbeda dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan berasal dari kata *wisdom* yang pelaksanaannya membutuhkan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh. Kebijakan berasal dari kata *policy* yang pelaksanaannya mencakup peraturan-peraturan di dalamnya dan sangat berkaitan dengan proses politik. Carl J. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang di usulkan seseorang atau kelompok pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹¹

Kebijakan publik merupakan apapun yang di pilih pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan kebijakan

⁹ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, h. 17.

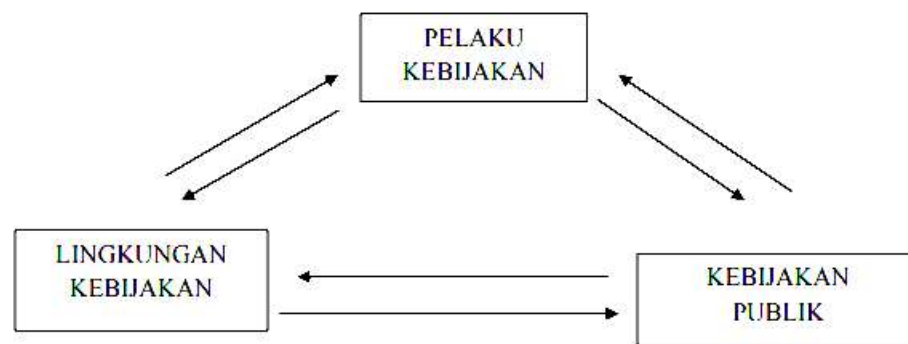
¹⁰ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, h. 43.

¹¹ *Ibid*, h. 44.

publik menjadi hak prerogratif pemerintah pusat baik itu lembaga eksekusif, legeslatif maupun yudikatif. Ketiga lembaga itu seharusnya menjadi satu kesatuan dalam perumusan kebijakankebijakan yang akan di keluarkan.¹²

Adapun lingkungan suatu kebijakan dapat di gambarkan dalam skema seperti berikut;

Gambar 1.1 Lingkungan Kebijakan¹³



Dalam gambar lingkungan kebijakan tersebut, ada keterkaitan antara pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kebijakan publik yang dikeluarkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak bisa terlepas dari ketiga komponen tersebut. Karakteristik kebijakan yang di keluarkan haruslah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat sebagai target dari kebijakan. Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai publik aktor, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk

¹² Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Jakarta, PT Buku Kita, 2008, h. 21.

¹³ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2003, h. 16.

mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Kajian tentang implementasi kebijakan merupakan cara untuk melakukan pemahaman terkait Program Wira Usaha Baru yang merupakan produk dari kebijakan publik yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan kondisi lingkungan dan pelaksana kebijakan.

1.5.1.2 Kebijakan Pemerintah

Kata pemerintahan secara etimologis berasal dari kata "Pemerintah". Sedangkan kata pemerintah berasal dari kata "Perintah". Perintah mempunyai pengertian menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah). Kemudian pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah. Pengertian diatas menunjukkan bahwa kata pemerintah dan pemerintahan meskipun mempunyai orientasi yang berbeda yakni kata pemerintah menunjukkan kepada subjek atau orang-orang/pemimpin-pemimpin mempunyai kekuasaan untuk memerintah atau berdaulat. Sebab bila tidak mempunyai kekuasaan berarti tidak bisa memerintah. Kata pemerintah menunjukkan perbuatan para pemimpin itu melakukan tugas dan fungsinya sesuai kekuasaan yang dimilikinya itu. Tetapi pada akhirnya kedua istilah tersebut digunakan orang secara bergandengan atau silih berganti. Karena dalam kepustakaan Inggris dijumpai perkataan "Government" yang sering diartikan sebagai "Pemerintah" ataupun sebagai "Pemerintahan". Samuel Edward Finer dalam bukunya *Comparative Government*, menyatakan bahwa istilah *government* paling sedikit mempunyai empat

arti yang menunjukkan; (1) Kegiatan atau proses memerintah yaitu melaksanakan control/pengawasan atau pihak lain, (2) Masalah-masalah (hal ikhwal) negara dalam mana kegiatan atau proses diatas dijumpai, (3) Orang-orang (maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas untuk memerintah, dan (4) Cara metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah.

1.5.1.3 Kebijakan Pemerintahan Menurut Para Ahli

Definisi kebijakan pemerintahan telah banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah:

1. Mc Rae dan Wilde

Mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai "Serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang". Implikasi dari definisi ini bahwa kebijakan pemerintahan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai dan pilihan pemerintah dan berdampak terhadap banyak orang. Jadi pilihan tindakan oleh pemerintah yang dampaknya hanya dirasakan seorang atau sedikit orang saja, maka ia tidak dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah. Satu contoh dari definisi ini seperti; keputusan seorang Rektor menerima seorang mahasiswa pindahan dari Universitas lain, itu tidak dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah, karena hanya berlaku dan berdampak pada seorang. Tetapi bila keputusan tersebut berkenaan dengan penentuan syarat-syarat yang diperlukan bagi semua mahasiswa pindahan dan lain-lain hal yang berkaitan dengan masalah itu hal itu baru disebut sebagai kebijakan pemerintahan

2. Thomas R. Dye

Mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai "Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu". Maksud definisi ini bahwa bila pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu tindakan misalnya melarang penduduk di suatu daerah untuk tidak boleh membangun rumah diatas tanah miliknya dengan pertimbangan tertentu, ini di namakan kebijakan pemerintahan. Sebaliknya tidak mengeluarkan larangan bagi penduduk untuk mendirikan rumahnya diatas miliknya, maka itupun disebut kebijakan pemerintahan. Kedua tindakan pemerintah itu memberikan pengaruh (dampak) yang sama besarnya kepada masyarakat.

3. Young dan Quinn

Mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai tindakan yang tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politik dan finansial untuk melakukannya. Definisi ini menunjukan bahwa kebijakan pemerintahan itu merupakan tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah yang berwewenang pada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah/negara, termasuk didalamnya kewenangan hukum, politik dan finansial.

1.5.1.4 Ruang Lingkup Kebijakan Pemerintahan

National Association of Schools of Public Affair and Administration (NASPAA) mencoba merumuskan ruang lingkup bidang kajian kebijakan pemerintahan, meliputi lima hal berikut ini:

1. Suatu proses memformulasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan.
2. Suatu strategi untuk mengoptimalkan dan memilih alternatif-alternatif
3. Suatu atribut yang jelas untuk membedakan antara kebijakan yang masih bersifat relatif ke suatu kebijakan yang jelas dari bidang, bidang fungsional tertentu, seperti kesehatan, transportasi, dan lain-lain
4. Memerlukan kecakapan-kecakapan untuk menganalisis sosio ekonomi, diagnosa politik, identifikasi isu, dan evaluasi program
5. Mempunyai pengetahuan dan komitmen terhadap nilai kepentingan masyarakat (public interest).

Dengan pengetahuan dan komitmen itu analisis yang tajam dilakukan dengan mempergunakan data yang ada mengenai luasnya pilihan-pilihan masyarakat umum (public choice), dan program yang mempercepat adanya kesempatan yang sama dan kesejahteraan, pengukuran-pengukuran terhadap pilihan masyarakat dan pengaruhnya, prosedur penilaian yang jujur atas keuntungan dan kerugian dan aneka macam milik umum dan pengukuran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam formulasi kebijakan dan evaluasinya.

Gerald Caiden dengan beberapa revisi dan tambahan dari Mifta Thoha mengemukakan, ruang lingkup studi kebijakan pemerintahan itu meliputi;

1. Adanya partisipasi masyarakat (public participation)

Pembuatan kebijakan bertalian dengan semua masalah bertalian tidak dapat diamati sendirian oleh pemerintah. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memutuskan semua isu (masalah) yang timbul. Partisipasi masyarakat disini menjadi amat penting berwujud pemberian saran, kritik, pemikiran bagi pemerintah (pembuat kebijakan) untuk bersama-sama memikirkan alternatif-alternatif guna mendapatkan cara-cara terbaik bagi pemecahan masalah dengan menetapkan kebijakan tertentu, ikut melaksanakannya dan menikmati hasilnya. Tanpa partisipasi masyarakat itu, kebijakan itu kurang bermakna.

2. Adanya kerangka kerja policy (policy framework). Kerangka kerja kebijakan (policy) disini adalah batas kajian yang mengkonstruksi semua faktor potensial yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah/dalam proses pembuatan kebijakan pemerintahan, meliputi:
 - a. apakah tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan yang akan dibuat?
 - b. bagaimana dan apakah nilai-nilai yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan pemerintahan?
 - c. apakah sumber-sumber yang mendukung kebijakan tersedia dan dapat dimanfaatkan?
 - d. siapakah pelaku yang terlibat dalam kebijakan pemerintahan dan apakah mereka mampu dan melaksanakannya?
 - e. bagaimanakah faktor lingkungan yang mempengaruhi kebijakan yang bakal dibuat, mendukung, menolak atau pasif?

- f. bagaimana strategi yang harus dijalankan didalam membuat, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan pemerintah ?
- g. berapa lama waktu yang tersedia merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan ?

3. Adanya strategi-strategi policy (policy strategy).

Studi kebijakan pada masa-masa terakhir ini mulai banyak memperhatikan/ memperhitungkan sifat kompleks dan saling ketergantungannya beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Suatu masalah sosial tampil kepermukaan, membutuhkan kebijakan untuk pemecahannya tidak lagi berasal dari satu bidang kajian saja. Masalah itu saling kait-mengkait dengan bidang kajian lainnya. Sebagai contoh; masalah tawuran pelajar belakangan selain sangat terkait dengan masalah kurang optimalnya pembinaan oleh guru-guru, juga kurangnya pembinaan dari para orang tua di rumah. Demikian pula masalah sosial lainnya. Karena itu, pembuat kebijakan harus mampu mengamati kesemuanya secara jeli sebelum menetapkan strategi yang dapat diandalkan. Pembuat kebijakan harus mampu mempertanyakan hal-hal berikut:

- a. Apakah yang menjadi persoalan sebenarnya sehingga darinya patut dibuatkan policynya?
- b. bagaimanakah persoalan dan kemungkinannya berkaitan dengan persoalan pemecahan bidang lainnya ?

- c. kepentingan-kepentingan siapakah yang bakal dipengaruhi dengan adanya pemecahannya nanti?
 - d. apakah ada kepentingan-kepentingan gabungan yang bakal merasa puas karena terpenuhi dengan adanya kebijakan tersebut?
 - e. hal-hal manakah yang dapat mewujudkan kepentingan-kepentingan masyarakat banyak?
 - f. sampai berapa jauhkah kompromi dimungkinkan untuk menjamin adanya keterbukaan pilinan-pilihan dimasa depan atau memperhitungkan masa lalu dengan mengharapkan masa depan lebih cerah ?
4. Adanya kejelasan tentang kepentingan masyarakat (public interst)
- Semua persoalan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat belum tentu mencerminkan kepentingan-kepentingan masyarakat pada umumnya. Ada kalahnya persoalan-persoalan itu merupakan pencerminan dari kepentingan masyarakat, kalau mempunyai pengaruh yang luas dan diangkat kepermukaan pentas oleh masyarakat. Kepentingan-kepentingan masyarakat umum itu dirumuskan hendaknya memberikan keseimbangan dengan kepentingan pribadi yang terorganisasikan sebelum hal tersebut diputuskan sebagai kebijakan/kebijaksanaan pemerintahan.
5. Adanya pelembagaan lebih lanjut dan kemampuan kebijakan pemerintahan

Suatu kebijakan pemerintahan supaya dapat diterapkan secara lebih baik sangat ditentukan oleh adanya pendirian lembaga riset mengenal kebijakan negara/ pemerintahan yang bersifat independen. Lembaga ini nantinya mampu menggali implikasi jangka panjang dari suatu kebijakan dengan cara;

- a. menggambarkan masa depan yang realistik, menciptakan unit-unit baru pembuat kebijaksanaan/kebijakan
 - b. merancang kembali organisasi/organisasi yang menangani program-program pokok,
 - c. penilaian/evaluasi dari kebijakan yang telah ada,
 - d. perencanaan kebijakan
 - e. sistem anggaran yang inovatif, dan lain sebagainya. Lembaga semacam ini amat bermanfaat untuk menutup kesenjangan antara harapan (teori) dari suatu kebijakan yang dibuat dan di praktek/ implementasinya.
6. Adanya isi kebijakan dan evaluasinya.

Studi tentang pembuatan kebijakan negara/pemerintahan didasarkan atas kebijakan yang nyata (actual policies).¹⁴

1.5.2 Implementasi Kebijakan

¹⁴ Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta, Kencana, 2011, h. 19.

1.5.2.1 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹⁵

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.¹⁶

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk programprogram atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang

¹⁵ Gaffar Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, h.15.

¹⁶ *Ibid*, h. 23.

memerlukan kebijakan publik penjas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll ¹⁷.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.¹⁸

Meter dan Horn mengungkapkan implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan menggunakan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan ¹⁹. Berikutnya menurut Purwanto dan Sulistyastuti, disebutkan implementasi kebijakan merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai

¹⁷ Riant Nugroho, *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan-Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik-Kebijakan sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2008, h. 158.

¹⁸ Solichin Wahab, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 1997, h. 27.

¹⁹ *Ibid*, h. 65.

usaha mewujudkan tujuan kebijakan, tujuan kebijakan diharapkan akan muncul bila *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran, sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.²⁰

Implementasi kebijakan publik memiliki beberapa model. Penelitian ini akan menggunakan model George Edward III. Edward menjelaskan bahwa implementasi kebijakan agar dapat efektif harus memperhatikan empat aspek yaitu *communication*, *resource*, *disposition or attitudes*, dan *beureucratic structures*.

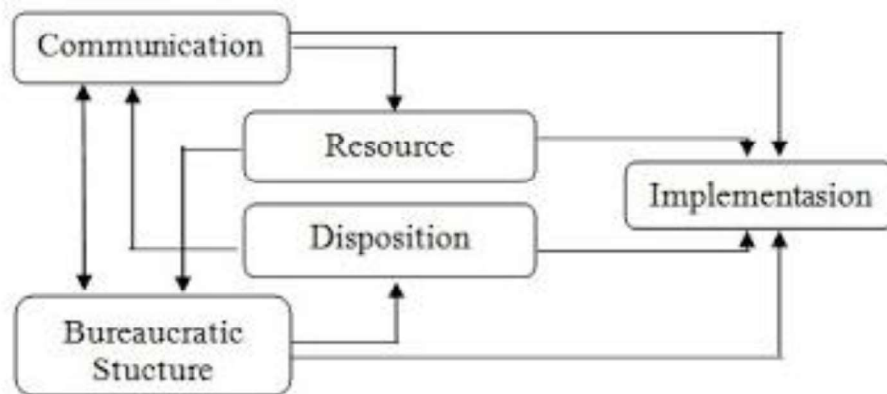
1. Komunikasi terkait dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran implementor harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran agar mengurangi distorsi implementasi. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan implementor juga harus tepat, akurat, dan konsisten.
2. Sumber daya (*resources*) terkait dengan ketersediaan sumber daya pendukung, utamanya sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. Meski isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi jika implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.
3. Disposisi (*disposition*) menyangkut dengan kesediaan dari para implementator untuk membawa kebijakan publik tersebut, kecakapan saja

²⁰ E.A Purwanto dan D.R. Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta, Gava Media, 2012, h. 21.

tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Contoh disposisi yaitu komitmen, kejujuran, sifat demokratis yang dimiliki implementator. Implementator yang memiliki disposisi baik maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sesuai harapan pembuat kebijakan. Akan tetapi, apabila implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dari pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga tidak akan berjalan efektif.

4. Struktur birokrasi (*beureucratic structures*) berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Faktanya di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama diantara lembaga-lembaga negara atau pemerintahan. Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/ organisasi kearah yang lebih baik ialah dengan melakukan *Standard Operating Procedures (SOPs)*. SOP yang terlalu panjang akan melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks (*redtape*), sehingga menyebabkan aktivitas organisasi fleksibel.

Berikut ini gambaran analisis implementasi kebijakan dengan menggunakan model Edward III:



Gambar 1.2 Implementasi Model Edward III²¹

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.²²

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

1.5.2.2 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

²¹ Solichin Wahab, *Op. Cit.* h. 30.

²² Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta, Karya Unipress, 1994, h. 35.

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.²³

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab, yaitu :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
 - b. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
 - c. Hubungan saling ketergantungan kecil
 - d. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
 - e. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat

²³ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Jakarta, Buku Kita, 2008, h. 53.

- f. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- g. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.²⁴

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

1. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

2. Sumber-sumber Kebijakan

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Komunikasi

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.;

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

²⁴ Solichin Wahab, *Op. Cit*, h. 54.

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badanbadan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

6. Kecenderungan para pelaksana

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan ²⁵.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;

²⁵ Budi Winarno, *Op. Cit*, h. 62.

4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
5. Adanya sanksi-sanksi tertentu yaang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan ²⁶.

1.5.2.3 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

1. Isi kebijakan
 - a. Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
 - b. Karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
 - c. Kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.
 - d. Penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangankekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

²⁶ Bambang Sunggono, *Op. Cit*, h. 144.

2. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

3. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas ²⁷.

5. Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya.

²⁷ Bambang Sunggono, *Op. Cit*, h. 149.

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :

1. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu;
2. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;
3. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum;
4. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan public:
5. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat ²⁸.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan

²⁸ Bambang Sunggono, *Op. Cit*, h. 144.

apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

1.5.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati. RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 menjadi penjabaran dari visi, misi dan program Bupati serta Wakil Bupati Pamekasan yang penyusunannya berpedoman pada kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, yakni RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah. Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan juga disesuaikan dengan kebijakan pembangunan daerah yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19, penyesuaian dengan SOTK baru serta dinamika pembangunan baru lainnya di Kabupaten Pamekasan, mempertimbangkan kondisi-kondisi capaian RPJMD periode sebelumnya termasuk tahapan-tahapan yang dirumuskan didalamnya dan analisis faktor internal maupun faktor eksternal berdasarkan hasil telaah visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan.

1.5.4 Program Wira Usaha

1.5.4.1 Pengertian dan Definisi Wira Usaha

Secara Etimologi kata wirausaha adalah berasal dari kata “wira” dan “usaha”. “Wira” berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, gagah berani, teladan, berbudi luhur, dan berwatak agung. Kata “wira” juga digunakan dalam kata “perwira”. Sedangkan “usaha” berarti “perbuatan atau upaya untuk mencapai sebuah tujuan”. Jadi, secara etimologis/harfiah, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Banyak sekali para ahli dan sumber terpercaya yang mencoba memberikan pengertian wirausaha.

Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa pengertian wirausaha sama dengan pengertian wiraswasta, yaitu orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Peter F. Drucker, 1965 mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, baik produk, jasa dan atau metode baru.

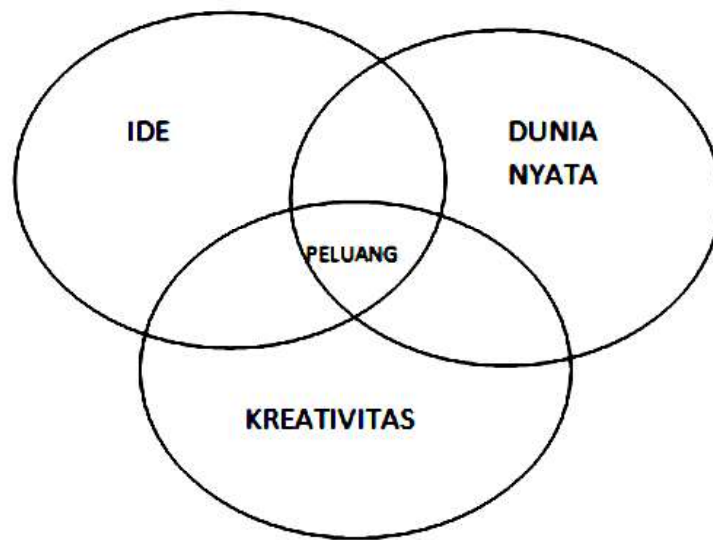
Pengertian ini mengandung maksud bahwa seseorang wirausahawan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain. Atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Menurut Joseph C. Schumpeter, wirausaha adalah orang yang mampu

menghancurkan keseimbangan pasar dan kemudian membentuk keseimbangan pasar yang baru dan mengambil keuntungan-keuntungan atas perubahan-perubahan tersebut.

Menurut Schumpeter, wirausaha merupakan inovator yang tidak selalu menjadi inventor (penemu). Definisi lainnya, entrepreneur adalah suatu cara berpikir, menelaah, dan bertindak yang didasarkan pada peluang bisnis, pendekatan holistik, dan kepemimpinan yang seimbang. Pendekatan holistik mengacu pada pembaruan nilai yang tidak lagi menggunakan shareholder approach, tetapi menggunakan stakeholder approach.²⁹ Mereka menambahkan unsur kreativitas sehingga produk yang mereka hasilkan berbeda dari produk yang sudah ada dengan membuat cara berjualan menjadi lebih praktis. Bagi Ir. Ciputra, paling tidak ada tiga ciri utama seorang entrepreneur, yaitu:

1. kemampuan melihat peluang bisnis
2. Inovatif dan kreatif, serta
3. Kemampuan untuk memperhitungkan risiko. Kemampuan melihat peluang bisnis ini berbeda dengan yang dilihat oleh orang lain, bahkan yang tidak diperhitungkan sama sekali (Gambar 2.1).

²⁹ Schumpeter J., *The Theory of Economic Development. An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle*. Harvard U, 1934, h. 233



Gambar 1.3. Kreasi: antara Ide, Dunia nyata, dan Kreatifitas.³⁰

Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses dan hasil bisnis (Achmad Sanusi, 1994).³¹

Pada umumnya kewirausahaan (enterprenership) memiliki hakekat yang sama, yaitu merujuk pada sifat, watak, dan ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha yang nyata dan dapat mengembangkannya dengan tangguh.

Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari,

³⁰ Kristina Wijaya. *Business Development, Marketing and Finance Director*. Buana Saphala Duta. Jakarta, Jakarta Raya, h. 152

³¹ Achmad Sanusi, *Strategi Operasional Peningkatan Mutu Wajar 9. Tahun dan Pendidikan Luar Sekolah di Desa Tertinggal*, Bandung, IKIP, 1994, h. 47.

menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. (Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 961/KEP/M/XI/1995)³².

Secara sederhana arti wirausahawan (Entrepreneur) adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka atau menciptakan usaha dalam berbagai kesempatan, dengan kreativitas dan inovasi yang terus-menerus untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah sebelumnya. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Seorang wirausahawan dalam pikirannya selalu berusaha mencari, memanfaatkan, serta menciptakan peluang usaha yang dapat memberi keuntungan. Resiko kerugian merupakan hal biasa karena mereka memegang prinsip bahwa faktor kerugian pasti ada, bahkan, semakin besar resiko kerugian yang bakal dihadapi, semakin besar pula keuntungan yang dapat diraih.

1.5.4.2 Perkembangan Wirausaha

Secara historis perkembangan Wirausaha telah dimulai sejak abad sebelum masehi, yaitu pada masa Marco Polo memulai dengan membuka rute perdagangan ke timur. Sebagai pelaut dia membuat kontrak dengan seorang saudagar untuk

³² Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 961/KEP/M/XI/1995

menjualkan barang dagangannya. Marcopolo dikenal sebagai merchant-adventurer menanggung semua resiko baik fisik dan mental, lain halnya dengan para pemodal. Apabila pedagang/pelaut berhasil menjual barang yang dibawanya dan berhasil kembali, keuntungan yang diperoleh dibagi ke mereka berdua.

Oleh karenanya wirausahawan akan mereformasi atau merevolusi kondisi yang tidak menguntungkan menjadi lebih menguntungkan, dengan mengeksploitasi segala penemuan dan kemungkinan pemanfaatan teknologi untuk menggantikan cara lama dalam mengoperasikan bisnis. Kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda secara nilai melalui pengorbanan waktu dan upaya, yang mengandung resiko finansial, psikologis dan sosial, dengan harapan menerima hasil penghargaan secara moneter dan kepuasan pribadi si wirausahawan. Karakteristik wirausaha dapat dilihat dari locus of control atau pengendalian diri atas dimensi internal dan eksternal. Pengaruh dimensi eksternal atau internal seseorang akan menentukan bagaimana seorang wirausaha mengelola perusahaannya. Pengaruh eksternal antara lain kekuatan lingkungan luar perusahaan sangat dominan, keberhasilan semata karena kemujuran, bisnis yang dilakukan karena keharusan dari apa yang dibaca, dan pengaruh anggota keluarga lebih menentukan keberhasilan.

Pengaruh internal antara lain keyakinan bahwa keputusan harus diambil oleh diri sendiri, kemauan untuk mencoba yang baru walaupun ada kekawatiran beratnya konsekwensi yang akan diterima, kepuasan akan keberhasilan pekerjaan, dan berupaya segera memperoleh sesuatu yang diinginkan. Secara internal locus of control

dapat dilihat dari sudut, sejauh mana seseorang memiliki keteguhan hati untuk mengatasi kemandekan dalam membentuk usaha baru, juga sejauh mana seseorang memiliki keinginan yang kuat untuk mengelola usaha baru dan menumbuhkannya.

Dimensi eksternal dan internal tidaklah menjadi patokan seseorang akan berhasil, kombinasi yang optimal diantara keduanya dapat membantu pengelolaan usaha dengan berhasil. Selain locus of control, kebebasan, kemauan mengambil resiko dan kebutuhan akan berprestasi (need for achievement) merupakan karakteristik lain dari seorang wirausaha. Umumnya, ketiga sifat terakhir sangat menonjol dalam watak seorang wirausaha yang berhasil.

Dalam perkembangannya kewirausahaan tidak saja berlaku pada dunia bisnis atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi berkembang di semua kehidupan yang ingin maju secara progresif. Salah satunya adalah pendekatan teoristik yang mencuat sebagai upaya penyempurnaan dan perbaikan manajemen birokrasi public disebut mewirausahakan birokrasi (reinventing government). Oleh karena itu di butuhkan strategi tertentu untuk melakukan perubahan dalam pemerintahan. Kata Strategi yang dimaksudkan disini adalah penggunaan titik pendongkrak utama untuk melakukan perubahan yang mendasar dalam pemerintahan. Dengan sumberdaya yang kecil mampu mendongkrak perubahan besar dalam pemerintahan melalui reinventing government.

Adapun pembaharuan di bidang birokrasi dengan reinventing government adalah dengan 10 karakteristik atau diberlakukan 10 prinsip perubahan orientasi birokrasi sebagai berikut:

1. Pemerintahan Katalis: Mengarahkan Ketimbang Mengayuh.

Pemerintahan katalis memisahkan fungsi pemerintah sebagai pengarah (membuat kebijakan, peraturan, undang-undang) dengan fungsi sebagai pelaksana (penyampai jasa dan penegakan). Disamping itu menggunakan berbagai metode (kontrak, voucher, hadiah, insentif pajak dan sebagainya) untuk membantu organisasi publik mencapai tujuan, memilih metode yang paling sesuai untuk mencapai efisiensi, efektivitas, persamaan, pertanggungjawaban dan fleksibilitas.

2. Pemerintahan Milik Masyarakat: Memberi Wewenang Ketimbang Melayani.

Menunjuk pada pemerintahan yang mengalihkan wewenang kontrol yang dimiliki ke tangan masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Dengan adanya kontrol dari masyarakat, aparatur pemerintahan (pejabat eksekutif dan legislatif) akan memiliki komitmen yang lebih baik dan lebih peduli serta lebih kreatif dalam memecahkan masalah.

3. Pemerintahan Kompetitif : Menyuntikkan Persaingan Ke Dalam Pemberian Pelayanan.

Pemerintahan semacam ini mensyaratkan persaingan diantara para penyampai jasa atau pelayanan (publik-swasta, swasta-swasta, publikpublik) untuk bersaing berdasarkan kinerja dan harga. Mereka memahami bahwa kompetisi adalah kekuatan fundamental untuk memaksa badan pemerintah melakukan perbaikan. Keuntungan dari kompetisi ini adalah efisiensi, respon terhadap kebutuhan pelanggan lebih besar, menghargai inovasi dan membangkitkan semangat harga diri dan semangat juang.

4. Pemerintahan Yang Digerakkan Oleh Misi: Mengubah Organisasi yang Digerakkan oleh Peraturan.

Pemerintahan yang berorientasi misi melakukan deregulasi internal, menghapus banyak peraturan internal dan secara radikal menyederhanakan sistem administrasi, seperti anggaran, kepegawaian dan pengadaan. Pemerintahan seperti ini mensyaratkan setiap badan pemerintah harus mempunyai misi yang jelas, kemudian memberikan kebebasan kepada para manajer untuk menemukan cara terbaik misi tersebut, dalam batas-batas legal. Keunggulan pemerintahan semacam ini adalah lebih efisien, efektif, inovatif, fleksible dan mempunyai semangat lebih tinggi.

5. Pemerintahan Berorientasi pada Hasil: Membiayai Hasil Bukan Masukan.

Menunjuk pada pemerintahan yang result-oriented dengan mengubah fokus dari input (kepatuhan pada peraturan dan membelanjakan anggaran sesuai ketentuan) menjadi akuntabilitas pada keluaran atau hasil. Mengukur kinerja badan publik, menetapkan target, memberi imbalan, kepada badan-badan

yang mencapai atau melebihi target, dan menggunakan anggaran untuk mengungkapkan tingkat kinerja yang diharapkan dalam bentuk besarnya anggaran.

6. Pemerintahan Berorientasi Pelanggan:Mematuhi Kebutuhan Pelanggan Bukan Birokrasi. Pemerintah berorientasi pelanggan memperlakukan masyarakat yang dilayani sebagai pelanggan. Oleh karenanya pemerintah melakukan survei pelanggan, menetapkan standart pelayanan, memberi jaminan, dan sebagainya. Dengan masukan itu, pemerintah mendesain organisasinya untuk menyampaikan nilai maksimum kepada pelanggan. Keunggulan dari sistem pemerintahan yang berorientasi pada pelanggan adalah meningkatkan pertanggungjawaban kepada pelanggan, mendepolitisasi keputusan terhadap pilihan pemberi jasa, merangsang lebih banyak inovasi, memberi lebih banyak pilihan kepada pelanggan, pemborosan dapat ditekan pemasokan sesuai dengan permintaan, mendorong pelanggan untuk membuat pilihan dan berkomitmen, serta menciptakan lebih besar bagi keadilan.
7. Pemerintahan Wirausaha: Menghasilkan Ketimbang Membelanjakan. Pemerintah berusaha memfokuskan energinya bukan sekedar untuk menghabiskan anggaran, tetapi juga menghasilkan uang. Mereka meminta masyarakat yang dilayani untuk membayar; menuntut return on investment. Mereka memanfaatkan insentif seperti dana usaha, dana inovasi untuk

mendorong para pimpinan badan pemerintah berfikir mendapatkan dana operasional.

8. Pemerintahan Antisipatif: Mencegah Daripada Mengobati

Menunjuk pada pemerintahan yang berfikir kedepan, mereka mencoba mencegah timbulnya masalah daripada memberikan pelayanan untuk menghilangkan masalah. Hal itu ditempuh melalui penggunaan perencanaan strategis, pemberian visi masa depan, dan berbagai metode lain untuk melihat masa depan.

9. Pemerintahan Desentralisasi : Dari Herarki Menuju Partisipasi dan Tim Kerja.

Adalah pemerintahan yang mendorong wewenang dari pusat pemerintahan melalui organisasi atau sistem. Mendorong mereka yang langsung melakukan pelayanan, atau pelaksana untuk lebih berani membuat keputusan. Keunggulan dari desentralisasi adalah lebih responsif dan fleksibel, lebih efektif, lebih inovatif, dan menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi sehingga lebih banyak komitmen dan akhirnya lebih produktif.

10. Pemerintahan Berorientasi Pasars : Mendongkrak Perubahan Melalui Pasar.

Pemerintahan berorientasi pasar sering memanfaatkan struktur pasar swasta untuk memecahkan masalah daripada menggunakan mekanisme administratif, seperti menyampaikan pelayanan atau perintah dan kontrol dengan memanfaatkan peraturan. Pemerintahan semacam ini menciptakan

insentif keuangan -insentif pajak, dengan cara itu organisasi swasta atau anggota masyarakat akan berperilaku yang mengarah pada pemecahan masalah sosial.

Guna mewujudkan keberhasilan program tersebut, maka mekanisme pelaksanaan program meliputi:

1. Pembibitan Wirausaha: menanamkan nilai profesionalisme, pola pikir, mindset menjadi risk taker, dan menemukan serta mencari calon-calon wirausaha.
2. Penempatan Wirausaha: membekali dan memperkuat calon wirausaha melalui pelatihan, technopreneur, Marketingpreneur, sociopreneur, trevelpreneur;
3. Pengembangan Usaha: melalui proses inkubator, mentoring, coaching, accelerator, kolaborasi, dan partnership.

Di tingkat Implementasi di lapangan program tersebut dilaksanakan dalam kegiatan program dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penyediaan dana kegiatan program yang bersumber dari APBD dan APBN;
2. Pembentukan tim kerja program;
3. Sosialisasi program;
4. Identifikasi Sarjana dan Pemuda Terdidik yang menjadi sasaran program; manfaat bagi pemilik kepentingannya. Ini berarti usaha tidak dapat memberikan kenaikan gaji, tidak bisa memperluas usaha.

Variabel keberhasilan usaha akan diukur berdasarkan empat indikator yang diadopsi berdasarkan indikator mengenai pelipatan modal, produksi, pelanggan, dan lokasi berusaha. Keberhasilan Usaha yakni peningkatan Modal, Pendapatan, Volume penjualan, Output produksi dan Tenaga Kerja. Indikator dalam variabel tingkat keberhasilan usaha terdiri dari jumlah pelanggan, jumlah transaksi, volume penjualan, omset penjualan, perolehan laba bersih dan waktu pencapaian BEP Di beberapa negara, sudah terbukti bahwa kemajuan suatu negara banyak dipengaruhi oleh perkembangan wirausaha atau entrepreneurship, Hampir semua negara berusaha menumbuh-kembangkan wirausahawan. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua upaya tersebut dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

1.5.4.3 Faktor Pendukung dalam Pengembangan Usaha

Keberhasilan usaha biasanya dicirikan dengan membesarnya skala usaha yang dimilikinya. Hal tersebut bisa dilihat dari volume produksinya yang tadinya biasa menghabiskan sejumlah bahan baku perhari meningkat menjadi mampu mengolah bahan baku yang lebih banyak dengan meningkatnya bahan baku yang dibutuhkan berarti meningkat pada jumlah buruhnya (baik buruh produksi maupun pemasaran) sekaligus mencirikan perluasan jaringan pemasaran. Laba perusahaan masih merupakan tujuan yang kritis dan menjadi ukuran keberhasilan usaha, tetapi bukan tujuan akhir dari suatu usaha.

Dikatakan sangat penting, karena apabila tidak memperoleh laba, maka usaha tidak dapat memberikan manfaat bagi pemilik kepentingannya. Ini berarti usaha tidak dapat memberikan kenaikan gaji, tidak bisa memperluas usaha. Variabel keberhasilan usaha akan diukur berdasarkan empat indikator yang diadopsi berdasarkan indikator mengenai pelipatan modal, produksi, pelanggan, dan lokasi berusaha.

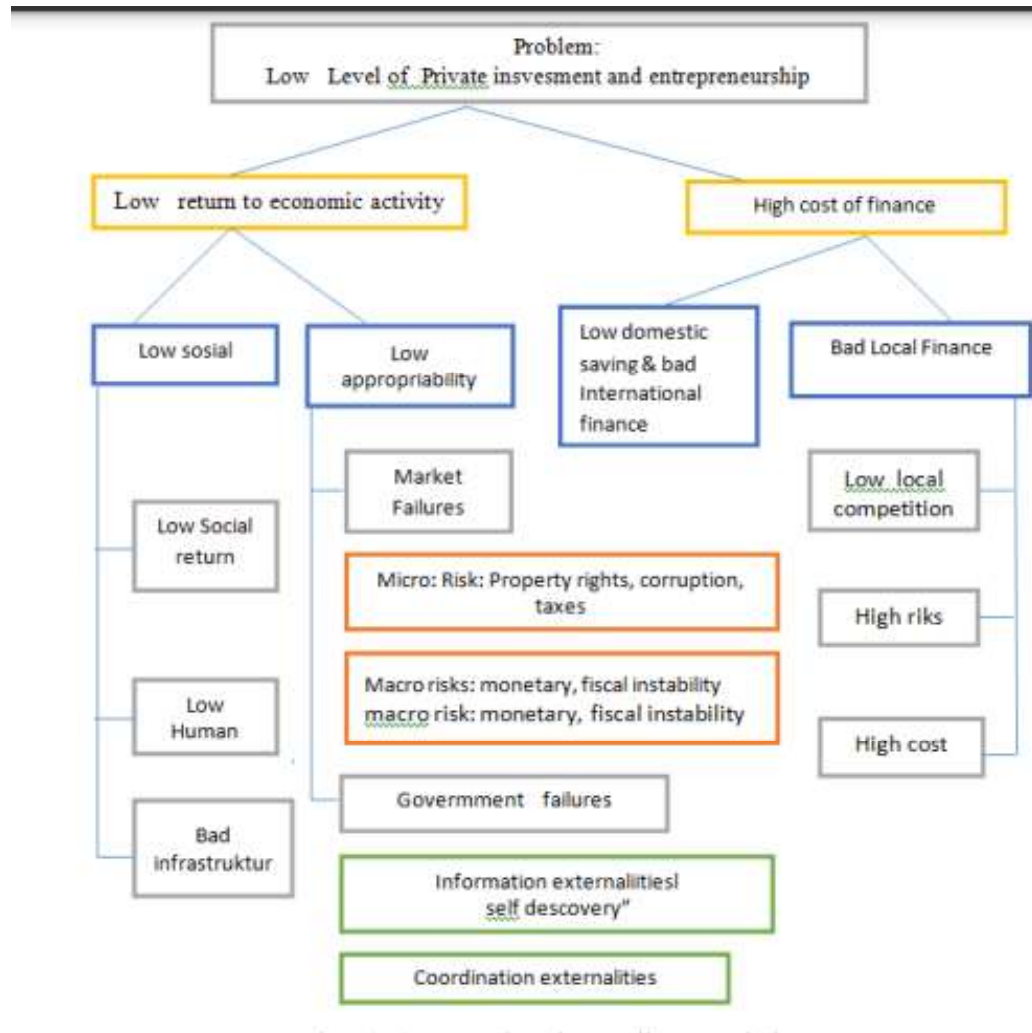
Indikator Keberhasilan Usaha yakni peningkatan Modal, Pendapatan, Volume penjualan, Output produksi dan Tenaga Kerja. Indikator dalam variabel tingkat keberhasilan usaha terdiri dari jumlah pelanggan, jumlah transaksi, volume penjualan, omset penjualan, perolehan laba bersih dan waktu pencapaian BEP di beberapa negara, sudah terbukti bahwa kemajuan suatu negara banyak dipengaruhi oleh perkembangan wirausaha atau entrepreneurship, Hampir semua negara berusaha menumbuh-kembangkan wirausahawan. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua upaya tersebut dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

1.5.4.4 Faktor Penghambat Pengembangan Kewirausahaan

1. Kondisi Makro

Penyebab investasi dan entrepreneurship tidak dapat tumbuh dengan subur di suatu negara. Alasan utamanya adalah rendahnya pengembalian atas aktivitas ekonomi dan tingginya biaya modal.

Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya hambatan birokrasi. Seperti adanya jargon” Mengapa harus dibuat cepat jika dapat diperlambat”. Ada dua 2 (dua) hal yang menjadi pertimbangan investor atas rendahnya pengembalian aktivitas ekonomi, yaitu pengembalian sosial yang rendah dan tendahnya kelayakan.



Gambar 1.4 Kerangka Diagnostik Pertumbuhan

Sedangkan Kelayakan, mencakup kegagalan pemerintah dan pasar. Kegagalan pemerintah merupakan gambaran secara umum yang masih terjadi seperti resiko makro, hak cipta, korupsi, dan pajak. Resiko Makro mencakup keuangan, moneter, dan stabilitas fiskal. Sedangkan kegagalan pasar meliputi masalah eksternalitas informasi dan koordinasi eksternal. Tingginya biaya modal merupakan masalah yang lain. Biaya modal dipengaruhi oleh dua faktor

penting, yaitu: tabungan domestik yang rendah dan keuangan internasional yang buruk serta keuangan lokal yang buruk karena kompetisi yang rendah, sehingga yang terjadi adalah adanya resiko dan biaya yang tinggi.

2. Secara Mikro:

Secara mikro banyak penulis yang menyampaikan penyebab kegagalan berwirausaha, antara lain:

1. Faktor penyebab kegagalan berwirausaha antara lain:

- a. Tidak kompeten dalam hal menejerial
- b. Kurang berpengalaman.
- c. Kurang dapat mengendalikan keuangan.
- d. Gagal dalam perencanaan.
- e. Lokasi yang kurang memadai.
- f. Kurangnya pengawasan peralatan.
- g. Sikap yang kurang sungguh-sungguh.
- h. Ketidak mampuan dalam melakukan peralihan kewirausahaan.
- i. Tidak kompeten dalam manajerial.
- j. Tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha
- k. Kurang berpengalaman, baik dalam kemampuan teknik, mengelola sumber daya manusia
- l. Kurang dapat mengendalikan keuangan
- m. Gagal dalam perencanaan;
- n. Lokasi yang kurang memadai;

- o. Sikap kurang sungguh-sungguh dalam berusaha;
 - p. Ketidak mampuan dalam melakukan transisi kewirausahaan.
2. Penyebab kegagalan dalam small business adalah:
- a. Lack of capital (kekurangan modal) tidak bisa menjalin relasi;
 - b. No business knowledge (kurang memiliki pengetahuan tentang bisnis) –
 - c. Poor management, tidak memiliki keterampilan dalam manajemen;
 - d. Inadequate planning, tidak membuat planning karena menganggap tidak penting;
 - e. Inexperience, kurang pengalaman
3. Faktor kegagalan dibagi menjadi faktor internal dan eksternal.
- a. Faktor internal disebabkan oleh:
 - Kurang pandai dalam beberapa hal tertentu, karena kurang belajar dan berlatih
 - Kurang pengalaman
 - Kurang baik mengatur waktu;
 - Kurang berani mengambil resiko
 - Kurang pandai meyakinkan orang
 - Kurang cepat bertindak
 - Kurang mampu melihat dan memanfaatkan peluang;
 - Tidak menepati janji;
 - Tidak jujur cepat merasa puas

b. Faktor eksternal

- SDM yang tidak memadai, kualitas dan kuantitasnya;
- Komitmen pihak lain yang tidak terbukti;
- Kenaikan harga barang yang tidak terduga;
- Perubahan ekonomi global;
- Kebijakan pemerintah
- Krisis ekonomi, politik, hukum; dan
- Perkembangan iptek.³³

1.5.5 Program Wira Usaha Baru (WUB)

Program Wira Usaha Baru atau Pembinaan Sepuluh Ribu Wirausaha Baru dan Calon Wirausaha Baru (*Sapu Tangan Biru*) merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam bidang ketenagakerjaan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Tujuan program Wira Usaha Baru³⁴ ini yakni (RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, h. VI-51):

1. Mengurangi pengangguran dengan menciptakan peluang berwirausaha berbasis potensi desa;
2. Membangun kerjasama pelatihan wirausaha dengan kementerian/ lembaga, BPWS, CSR perusahaan, dll;

³³ *Ibid*, h. 21.

³⁴ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, *Loc. Cit.*

3. Memajukan perusahaan yang telah beroperasi untuk menjalankan fungsi sebagai Balai Latihan Kerja bagi calon tenaga kerja lokal;
4. Optimalisasi fungsi Balai Latihan Kerja untuk menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan menghasilkan tenaga kerja bersertifikat;
5. Mendorong terbentuknya komunitas baru berbasis ekonomi melalui Program “*Millenial Talent Hub*” sebagai fungsi Balai Latihan Kerja;
6. Penguatan regulasi dan kebijakan dalam rangka kemudahan investasi padat modal atau padat karya;
7. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal dalam rangka iklim investasi yang baik dan kondusif;
8. Meningkatkan komunikasi dan promosi investasi bersama para investor melalui forum pengusaha besar maupun kecil;
9. Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dalam rangka penyerapan tenaga kerja;
10. Penyediaan dan Optimalisasi Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera);
11. Peningkatan kualitas pengolahan produk industri rumah tangga berbasis *One Village One Product*;
12. Revitalisasi Dasar dan Pasar Tetap Tradisional yang bersih;
13. Merintis Wisata Edukasi, wisata halal dan taman budaya yang mampu menumbuhkan peluang berwirausaha.

Pelaksanaan pelatihan WUB ini dilakukan di Disnakertrans, Kantor Kecamatan, Balai Desa/Kelurahan, Yayasan dan rumah penduduk yang representatif. Program Pemagangan ke UKM luar daerah bagi yang tidak dapat dilaksanakan di Pamekasan. Pengiriman ke BLK yang dikelola Kemenaker, syarat minimal 18 tahun, pendidikan minimal SD/ sederajat dan diseleksi tim Kemnaker.

Output yang diharapkan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dari program WUB ini adalah terciptanya wirausaha yang produktif. Tolak ukur keberhasilan program WUB apabila: a) wirausaha mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama, b) memiliki pelanggan, c) bisa menjadi nilai jual atau nilai tambah daerah tersebut, dan d) mampu mengembangkan usahanya. Sedangkan outcome yang diinginkan yakni Calon WUB produktif diharapkan menjadi wirausaha mandiri. Kriteria wirausaha mandiri ini bila ada kontinuitas produksi, produk memenuhi permintaan pasar, produk memenuhi persyaratan kurasi, profit income, ada penyerapan tenaga kerja, dan wirausaha tersertifikasi BNSP. Adapun skema kewirausahaan terintegrasi sebagai berikut:

Gambar 1.5 Skema Kewirausahaan Terintegrasi³⁵

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif. Pada penelitian kualitatif seorang peneliti menggunakan logika berfikir induktif. Artinya dari fakta-fakta atau fenomena-fenomena sosial yang ada, lalu dilakukan pengamatan di lapang, dan selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan teorisasi dari pengamatan yang telah dilakukan seorang peneliti. Sementara, penelitian yang memiliki tujuan deskriptif akan mendeskripsikan fenomena sosial yang ada sebagai

³⁵ Paparan Bupati “Wirausaha Baru Wujudkan Pamekasan Hebat”

gambaran tentang kondisi yang terjadi di lapang. Krisyantono menjelaskan deskriptif kualitatif sebagai.³⁶

“strategi mendeskripsikan data secara sistematis, faktual, dan akurat dengan berupaya menggali kedalaman atau makna data lebih mendalam, seperti mengapa realitas itu terjadi, motif-motif pelaku sosial, latar belakang yang mempengaruhi motif, serta pengaruh konteks-konteks lain (ada upaya memverifikasi data sehingga disebut juga deskriptif verifikasi)”.

Peneliti pada penelitian ini akan melakukan pengamatan terkait fakta-fakta atau fenomena implementasi RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 di bidang ketenagakerjaan dengan Studi Kasus Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Pamekasan yakni program Wira Usaha Baru (WUB).

1.6.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti mengumpulkan data yang selanjutnya akan dianalisis. Pemilihan lokasi penelitian pada penelitian ini dilakukan dengan sengaja. Lokasi yang ditetapkan yaitu pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, tepatnya pada dinas-dinas pelaksana program Wira Usaha Baru (WUB) seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSP Naker), Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Pembudayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk (DP4), dan Dinas PMD (DPMD).

³⁶ Rachmat Krisyantono, *Teknik Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta, Kencana Prenadamedia, 2021, h. 62.

1.6.3 Penentuan Informan

Informan merupakan orang-orang tertentu yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang diperlukan oleh peneliti di dalam proses penelitian. Orang tersebut dianggap memiliki pengetahuan tentang data maupun informasi yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan dalam penelitian tersebut. Informan dalam penelitian kualitatif berkembang terus (*snowball*) secara bertujuan sampai data yang dikumpulkan dianggap telah jenuh (hasil tetap).

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti sebagai usaha untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini menggunakan data primer maupun data sekunder. Sugiyono menyatakan bahwa, “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian untuk mendapatkan data”.³⁷

1.6.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Data yang telah terkumpul melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi, kemudian dipelajari serta ditelaah, dan selanjutnya diabstraksi secara cermat dan sistematis agar didapatkan hasil penelitian yang mendalam dan komprehensif. Apabila jawaban yang diperoleh belum memuaskan, maka peneliti melanjutkan

³⁷ Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2010, h. 223.

kembali untuk mengumpulkan data, sampai tahap tertentu dan diperoleh data yang dianggap kredibel.

1.6.6 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi dengan memanfaatkan sumber data. Triangulasi dengan Sumber Data membandingkan serta mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif.³⁸

³⁸ *Ibid*, h. 231